

NASKAH AKHIR  
13 Desember 2012  
PUKUL 14.00 WIB.



**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PENUTUPAN MASA SIDANG II  
TAHUN SIDANG 2012-2013**

**JUM'AT, 14 DESEMBER 2012**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PENUTUPAN MASA SIDANG II  
TAHUN SIDANG 2012-2013**

**JUM'AT, 14 DESEMBER 2012**

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

**Salam Sejahtera bagi kita sekalian,**

**Yang kami hormati,**

- **Para Wakil Ketua DPR-RI,**
- **Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan,**
- **Para Anggota Dewan,**

Pada hari ini Dewan akan menutup Masa Sidang II Tahun Sidang 2012-2013 yang telah berjalan selama 20 hari kerja, dimulai 19 November 2012. Mulai besok pagi, Dewan akan memasuki Masa Reses sampai dengan tanggal 6 Januari 2013. Selaku Pimpinan Dewan, saya akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2012-2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 218 ayat (2), yang menguraikan kegiatan Dewan pada Masa Sidang ini dalam pelaksanaan tiga fungsi Dewan, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPR-RI telah memproses penetapan berbagai pejabat publik, yaitu 9 (sembilan) Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi VI. Hasil pengujian ini telah mendapat persetujuan pada Rapat Paripurna tanggal 11 Desember yang lalu, dan segera akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme Dewan. Kesembilan nama yang telah ditetapkan tersebut, (1) Sdr. Ir. M. Nawir Messi, M. Si.; (2) Sdr. Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, SE., MS.; (3) Sdr. Dr. Sukarmi, SH., MH.; (4) Sdr. Dr. Syarkawi Rauf, SE., ME.; (5) Sdr. Drs. Munrokhim Misanam, MA., Ec., Ph.D.; (6) Sdr. Saidah Sakwan, MA.; (7) Sdr. R. Kurnia Sya'ranie,

SH., MM.; (8) Sdr. Dr. Drs. Chandra Setiawan, MM.; (9) Sdr. Kamser Lumbanradja, MBA.

DPR juga telah memberikan pertimbangan atas calon-calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Tunisia, Kanada, Prancis dan Seycelles. Adapun pejabat-pejabat publik lain yang masih dalam proses penanganan adalah calon-calon Hakim Agung, untuk mengisi kekosongan 5 (lima) Hakim Agung Periode I dan 4 (empat) Hakim Agung Periode II untuk tahun 2012 yaitu: Hakim–Hakim Agung Pidana Militer, Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara. Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) juga masih dalam proses penanganan. Diharapkan, pejabat-pejabat publik tersebut sudah dapat ditetapkan pada Masa Sidang III yang akan datang.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada Masa Sidang II, RUU yang dapat diselesaikan adalah RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kita bersyukur bahwa RUU ini dapat dituntaskan walaupun melalui beberapa kali perpanjangan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah salah satu **lembaga keuangan bukan bank**, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mendapatkan akses dalam perolehan dana pinjaman atau pembiayaan dari lembaga perbankan. Sebagian besar kelompok masyarakat ini membutuhkan dana/modal untuk mengembangkan usaha mikro atau usaha kecil, seperti pedagang pasar tradisional, usaha kerajinan rumah tangga, petani, peternak, nelayan, dan lain-lain. Dengan tumbuh dan berkembangnya LKM, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan.

Pada Masa Sidang ini pun, DPR RI telah dapat menyelesaikan 7 (tujuh) RUU tentang pembentukan daerah otonom baru, sebagaimana telah dilaporkan oleh Komisi II dan telah disetujui dalam rapat paripurna DPR.

Pembahasan mengenai RUU tentang Pendidikan Kedokteran masih berlanjut dilanjutkan oleh Panja Komisi X DPR, dengan catatan, bahwa Panja ini perlu diperkuat

dengan Anggota-anggota Komisi IX, agar diperoleh hasil pembahasan yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Komisi, Badan Legislasi (Baleg) dan beberapa Panitia Khusus (Pansus) masih melanjutkan pembahasan 31 (tiga puluh satu) RUU Prioritas tahun 2012, 2 (dua) RUU dalam tahap harmonisasi di Baleg, dan 2 (dua) RUU Ratifikasi. Komisi dan Badan Legislasi, juga sedang menyusun/merumuskan 19 (sembilan belas) RUU. Sementara Pemerintah sedang menyelesaikan penyusunan/perumusan 6 (enam) RUU Prioritas tahun 2012. Di antara 31 (tiga puluh satu) RUU yang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, 20 (dua puluh) RUU di antaranya, telah mengalami perpanjangan beberapa kali karena ada beberapa substansi/materi yang belum disepakati oleh Pemerintah dan DPR. Untuk tahun 2013, diharapkan 31 (tiga puluh satu) RUU tersebut dapat diselesaikan, agar dapat mengatasi kekosongan hukum.

Terkait dengan pembahasan RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Desa, dan RUU tentang Pemilukada, telah dilakukan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Komisi II DPR-RI, Pimpinan Pansus, dan Pimpinan Fraksi-fraksi. Terdapat kesepakatan bahwa pembahasan ketiga RUU tersebut dilakukan secara simultan karena materinya saling berkaitan. Kesepakatan ini penting, mengingat kecenderungan pendapat yang mengemuka saat ini adalah, bahwa RUU tentang Pemerintahan Daerah dapat diselesaikan terlebih dahulu.

Selanjutnya, perlu kami sampaikan mengenai pembahasan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU-PPDK). Tahapan pembahasan RUU ini sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I oleh Pansus. RUU ini adalah RUU inisiatif DPR-RI dan merupakan RUU Prioritas tahun 2012. Hal yang melatarbelakangi disiapkannya RUU-PPDK oleh DPR antara lain, bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 140 (seratus empat puluh) juta penduduk yang bermukim di wilayah pesisir, di pulau terpencil yang kurang tersentuh pembangunan. Kebijakan pembangunan Indonesia selama ini dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan yang berorientasi daratan, padahal Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbeda untuk pembangunan di provinsi kelautan.

Dalam perkembangannya, Pemerintah menolak meneruskan pembahasan dengan beberapa alasan, antara lain bahwa muatan materi dalam RUU-PPDK dianggap bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya

bertentangan dengan Pasal 18A Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea*, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Atas sikap Pemerintah ini, Pansus RUU-PPDK **menolak** pendapat Pemerintah dan berkehendak melanjutkan pembahasan, karena RUU ini sudah memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta telah disinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. RUU ini juga dibuat sebagai produk politik-hukum yang responsif atas kebutuhan masyarakat di kepulauan. Dalam forum konsultasi dengan Pimpinan Dewan, akhirnya diputuskan bahwa pembahasan RUU ini tetap dilanjutkan sesuai dengan kewenangan Dewan.

Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari beberapa RUU yang saat ini sedang dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 20 ayat (2) telah menegaskan bahwa: "*setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*". Berdasarkan aturan ini, maka DPR dan Presiden mempunyai kewajiban yang sama untuk membahas setiap RUU, baik yang datang dari DPR maupun datang dari Pemerintah. Jadi, tidak boleh satu pihak menyatakan sikap menolak meneruskan pembahasan, hal ini dimaksudkan agar tidak melanggar amanat konstitusi. Kalaupun para pihak menyikapi ada perbedaan mendasar dalam pembahasan, maka tahapan pembahasan dikembalikan kepada mekanisme pembahasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPR, baik dalam tahap pembahasan di Komisi atau Pansus, ataupun pada tahap pembahasan di Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi. Kendala yang dijumpai dalam pembahasan dapat dicarikan jalan keluar melalui forum konsultasi antara Pimpinan Dewan dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bersangkutan, dan bahkan kalau diperlukan, akan dikonsultasikan oleh Pimpinan Dewan dengan Presiden. Hal ini telah beberapa kali dilakukan.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, baru-baru ini, Pimpinan Dewan didampingi Pimpinan Baleg dan Komisi XI, telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah, yaitu Menteri Keuangan dan Pimpinan Bank Indonesia, sehubungan usulan Pemerintah untuk mengajukan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi

Rupiah), dalam Prolegnas Prioritas 2013. RUU ini dimaksudkan untuk memperkuat kurs Rupiah terhadap mata uang asing, serta untuk menyederhanakan mata uang Rupiah, tetapi bukan untuk memotong nilai mata uang.

Dalam forum konsultasi tersebut, Pimpinan Dewan meminta Pemerintah untuk mensosialisasikan rencana redenominasi kepada masyarakat luas, agar tidak ada kekeliruan penafsiran atas muatan materi RUU ini. Diharapkan, tidak ada salah persepsi bahwa dengan UU ini akan dilakukan pemotongan nilai mata uang.

Satu RUU lagi, telah disampaikan dari Presiden kepada Ketua Dewan, yaitu RUU tentang Hukum Acara Pidana. RUU ini sangat dinantikan, karena merupakan salah satu UU yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional yang sangat mendesak untuk segera dibahas dan diselesaikan.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, pada Masa Sidang II, Komisi-Komisi lebih terfokus pada Evaluasi Pelaksanaan APBN 2012 dan evaluasi, serta tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI Tahun Anggaran 2012. Beberapa Komisi telah melakukan Rapat Kerja dengan pasangan kerjanya masing-masing.

Dalam rapat-rapat yang telah berlangsung, terungkap bahwa dalam realisasi APBN 2012, beberapa Kementerian masih belum optimal dalam penyerapan anggaran, padahal saat ini sudah mendekati akhir tahun anggaran. Oleh karenanya, Dewan melalui rapat-rapat Komisi pada umumnya menyatakan keprihatinannya terkait dengan hal tersebut.

Arti penting optimalisasi penyerapan anggaran, tentunya tidak hanya untuk kepentingan penyerapan anggaran itu sendiri, tetapi yang adalah penguatan fungsi anggaran sebagai pendorong utama proses pembangunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% pada tahun 2013. Untuk itu, Dewan mendorong Pemerintah agar dalam menyongsong perencanaan anggaran tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya, untuk lebih cermat dan tidak terlalu ekspansif dalam proses perencanaan pembangunan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam kaitan ini, Dewan juga mengingatkan kementerian/lembaga untuk menindaklanjuti secara konkret rekomendasi BPK-RI.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Masalah kedua berkaitan dengan fungsi anggaran adalah permasalahan solusi terhadap BBM bersubsidi. Permasalahan alokasi BBM bersubsidi senantiasa terulang kembali dengan implikasi meningkatnya beban anggaran negara. Situasi seperti ini sebenarnya telah terjadi dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2007, di mana volume kuota BBM bersubsidi selalu melampaui batas yang ditetapkan. Dalam anggaran tahun 2012, alokasi BBM bersubsidi mengalami kenaikan sebanyak dua kali, dari alokasi sebesar 40 juta kiloliter, kemudian melalui APBN-Perubahan mendapatkan tambahan sebesar 4,04 juta kiloliter, dan terakhir sesuai dengan kesepakatan terbaru DPR dengan Pemerintah, alokasi ditambah 1,23 juta kiloliter, sehingga volume BBM bersubsidi mencapai 45,27 juta kiloliter. Tambahan anggaran untuk alokasi kedua ini menyedot anggaran sebesar Rp. 6 triliun. Dewan memandang bahwa Pemerintah harus segera menuntaskan pengendalian BBM bersubsidi, sehingga tidak menimbulkan resiko beban anggaran negara yang semakin besar, potensi gejolak sosial dan bahkan politis.

Terkait dengan over kuota BBM bersubsidi tahun 2012, Komisi VII pada awal bulan ini telah melangsungkan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM didampingi Kepala BPH Migas, dan Dirut PT. Pertamina (Persero). Dalam rapat kerja tersebut, Komisi VII mendengarkan paparan Menteri ESDM tentang usulan pertambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2012 sebesar 1,23 juta kiloliter dengan rincian Premium/Biopremium 0,5 juta kiloliter dan minyak Solar/Biosolar sebesar 0,73 juta kiloliter. Komisi VII dapat menyetujui dengan **catatan keras** sebagai berikut:

Komisi VII meminta Pemerintah untuk:

1. melakukan audit terhadap pengadaan dan penyaluran BBM bersubsidi Tahun 2012 yang dilakukan oleh BPK-RI.
2. untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi.
3. untuk menerapkan sistem monitoring dan pengendalian BBM PSO secara *online* sampai ke SPBU pada PT. Pertamina (Persero), yang dapat diakses secara *realtime* sehingga menjamin azas *accountable* dan *good governance* di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan mamahami bahwa solusi terhadap persoalan yang sudah sedemikian kronis, tentu tidak ada satupun obat mujarab yang dapat menyelesaikannya secara seketika dan tanpa dampak. Namun Dewan mengharapkan, bahwa Pemerintah memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah konkret, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan yang baik dalam mengelola isu BBM bersubsidi kedepan, menjadi langkah awal yang sangat berarti.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8% Dewan meminta agar dapat direalisasikan, walaupun ada berbagai tantangan yang menghadang di antaranya implikasi semakin menurunnya pertumbuhan *product domestic bruto* dunia akibat menurunnya volume perdagangan dunia dan semakin tingginya tekanan inflasi. Pada sisi ini, Bank Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan eksternal dan arah inflasi. Dewan mengingatkan bahwa tantangan perekonomian nasional pada 2013 akan lebih berat dibandingkan tahun ini.

Untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan, Dewan mengharap Pemerintah dan otoritas moneter harus menindaklanjutinya dengan kerja keras pada tahun depan, membenahi permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan investasi, melalui penciptaan kondisi kondusif dengan adanya kepastian hukum, keamanan, infrastruktur, permasalahan buruh dan upah. Dewan meminta agar lembaga terkait hendaknya melihat risiko-risiko yang muncul, jangan terbuai melihat sisi positifnya saja dalam capaian pertumbuhan. Dewan khawatir bila hanya melihat dari sisi positifnya, otoritas akan terlena dan melupakan resiko yang ada.

Dalam rangka pengembangan infrastruktur misalnya, hal ini bukan sesuatu yang berlebihan mengingat alokasi anggaran Pemerintah Pusat yang mencapai Rp. 594,6 triliun dalam APBN 2013. DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk memprioritaskan pada belanja infrastruktur. Belum lagi, tambahan realokasi hasil penghematan subsidi listrik.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi-komisi telah melakukan Rapat-rapat Kerja dengan Pemerintah, antara lain Komisi IX DPR telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja. Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, yang dibahas adalah agenda persiapan BPJS Kesehatan, penjelasan program internsif, pelaksanaan Kesehatan Haji 2012, dan persiapan Perencanaan Kesehatan Haji 2013, serta penempatan dokter daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Perihal Program Internsif Dokter Indonesia, Komisi IX DPR tidak menyetujui. Untuk itu, Menteri Kesehatan diminta melakukan evaluasi kembali. Komisi IX DPR juga mendesak Pemerintah untuk memperhatikan dan menyusun regulasi kebijakan terkait pengaturan standar gaji tenaga kesehatan yang layak dan objektif, distribusi tenaga kesehatan yang merata dan tepat sasaran.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan tahun 2014, Dewan mendesak Pemerintah untuk mempercepat penerbitan sejumlah Perpres sebagai tindak lanjut dari UU BPJS yang seharusnya sudah dikeluarkan selambat-lambatnya satu tahun sejak UU BPJS diundangkan pada tanggal 25 November 2011.

Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyimpulkan bahwa DPR-RI mendesak Pemerintah untuk memperketat persyaratan dan menambah poin kesepakatan dalam *MoU* dengan Malaysia, sehingga bersifat menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan serta meningkatkan posisi tawar pekerja Indonesia. *MoU* untuk perlindungan TKI dengan Kerajaan Arab Saudi juga perlu dilakukan lebih dahulu, sebelum penempatan TKI baru. DPR-RI juga mendesak Pemerintah untuk memperluas pelatihan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan, dalam rangka menciptakan lapangan kerja dalam negeri, guna mengurangi TKI ke luar negeri.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Kalangan Dewan terkejut dengan adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dalam sidang terakhirnya membuat putusan cukup kontroversial. DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyertakan 18 (delapan belas) Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi, untuk dilakukan proses

verifikasi faktual. Kalangan Dewan berpendapat, bahwa putusan DKPP melebihi kewenangannya. Pimpinan Dewan mengharapkan klarifikasi mengenai hal ini, karena putusan DKPP bersifat final dan KPU akan melaksanakannya.

Dewan mengingatkan, bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pemilu. Untuk itu, Pimpinan Dewan mengingatkan agar putusan DKPP harus sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilu.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Rapat Dengar Pendapat Tim Pengawas DPR-RI dengan KPK terhadap Kasus Bank Century pada minggu–minggu terakhir, telah mengagendakan pembahasan *progress report* penyelidikan kasus Bank Century. Pimpinan KPK menyampaikan laporan perkembangan penyelidikan kasus Bank Century sampai dengan 19 November 2012, bahwa telah dilakukan permintaan keterangan kepada 153 orang. Kegiatan penyelidikan periode setelah 18 September, intinya adalah telah ditemukan adanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Selanjutnya, Tim Pengawas Century melalui Tim Kecil telah melakukan evaluasi atas kerja Tim Pengawas selama satu tahun. Beberapa hari yang lalu, Tim pengawas Century telah melaporkannya kepada Rapat Paripurna dengan keputusan: *Pertama*, ada kemajuan di dalam proses penegakan hukum, akan tetapi perkembangannya masih jauh dari harapan untuk mencapai penuntasan kasus. Direkomendasikan agar KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Tim Bersama Aset Recovery serta pihak-pihak terkait, terus melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk penuntasan kasus ini.

*Kedua*, DPR masih perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi DPR-RI tentang penyelesaian kasus Bank Century, baik berkaitan dengan penegakan hukum, pengembalian dana nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas, penyusunan paket UU Perekonomian dan Perbankan. Untuk itu, DPR-RI menyetujui bahwa Tim Pengawas perlu diperpanjang masa kerjanya selama satu tahun.

Atas evaluasi tersebut, Tim Pengawas melihat, tidak saja secara politik tetapi juga secara hukum, kelanjutan dari penegakan hukum akan sangat menentukan masa depan bagi penuntasan kasus ini secara menyeluruh.

Selanjutnya dalam Rapat Paripurna hari yang sama, telah didengar laporan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Tim ini juga disepakati untuk diperpanjang sampai dengan 2013, karena Tim berpendapat bahwa penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut, ternyata belum optimal karena peraturan pelaksana UU tersebut sebagai turunannya, belum terbentuk. DPR juga memandang bahwa pelaksanaan UU ini masih meminta perhatian khusus DPR-RI untuk dipantau secara berkelanjutan.

Di samping kedua Tim tersebut, Tim Sengketa Tanah dan Konflik Agraria yang sudah terbentuk, yang sampai sekarang belum melakukan kegiatan, Pimpinan mengharapkan agar Masa Sidang yang akan datang dapat segera melaksanakan tugasnya.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada bulan-bulan terakhir ini banyak permasalahan bangsa yang meminta perhatian kita semua, baik berkaitan dengan masalah politik-keamanan, penegakan hukum, sosial kemasyarakatan, dan berbagai permasalahan lain.

Dalam dinamika politik dan keamanan, Dewan ingin menyampaikan keprihatinan mendalam dengan tidak terkendalikannya kelompok bersenjata, khususnya di Jayawijaya dan Kabupaten di sekitarnya, yang telah menewaskan beberapa aparat Kepolisian dan warga sipil. DPR-RI mendorong Pemerintah untuk melakukan penanganan secara intensif dan penangkapan terhadap kelompok bersenjata tersebut, dan mengusut kelompok mana sebetulnya yang ada dibelakangnya. Dewan mendukung agar penanganan atas kasus ini dilakukan dengan cepat, tepat sasaran dengan melibatkan personel TNI apabila diperlukan. Kita tidak ingin korban bertambah lagi, baik dari aparat maupun dari warga sipil. Kita ingin masyarakat Papua dapat hidup tenteram tidak dihantui rasa ketakutan, dan kita pun ingin ada peningkatan kesejahteraan sehingga masyarakat tidak mudah diprovokasi.

Kita juga sangat prihatin dengan terjadinya konflik komunal di salah satu desa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Konflik komunal ini sudah terjadi berulang kali pada tahun ini. Maraknya konflik komunal sebagai benturan horizontal antar warga, memunculkan kesan aparat maupun pemerintah setempat melakukan “pembiaran”.

Untuk mencegah terjadinya konflik komunal semacam ini, perlu dibuka ruang komunikasi masyarakat dengan pejabat pemerintah setempat, sehingga segala permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dihindari sedini mungkin. Kalaupun terjadi pelanggaran di tengah masyarakat dapat dimediasi oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat, atau kalau sudah terjadi pelanggaran hukum, maka pelanggaran hukum tersebut dapat segera diproses secara hukum yang berlaku.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Di bidang penegakan hukum, saat ini banyak kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik, seperti adanya dikotomi dalam pemberantasan narkoba. Di satu sisi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polri, telah berhasil menangkap bandar narkoba dengan sindikatnya, yang makin hari makin merajalela, sementara dari sisi lain, badan peradilan memvonis ringan para tersangka tersebut, bahkan di tingkat Mahkamah Agung, ada putusan Kasasi dan putusan Peninjauan Kembali yang mengurangi hukuman dari para terpidana narkoba. Keputusan ini patut dicurigai.

Memang putusan badan peradilan tidak bisa diintervensi, namun Dewan mengingatkan agar permasalahan ini mendapat perhatian dan tidak terulang kembali. Untuk itu, kepada Komisi III diminta dapat menangani masalah ini dengan baik. Kita mengingatkan badan peradilan, karena narkoba adalah barang haram, merupakan komoditas yang sangat berbahaya dan merusak masa depan generasi mendatang.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Rencana penggantian kurikulum dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tengah direncanakan oleh Pemerintah dan akan diberlakukan tahun depan, dan direncanakan berjalan tiga tahun. Hal ini dimaksudkan agar, pelajar, guru dan sekolah dapat menyesuaikan diri dengan

perubahan. Selain bertahap, implementasi kurikulum baru akan dilakukan hanya kepada sekolah-sekolah di daerah yang sudah siap.

Karena banyaknya kritik masyarakat terhadap rencana kurikulum baru ini, Komisi X DPR telah melakukan pembahasan mengenai hal ini menjelang hari akhir penutupan sidang. Kalangan Dewan mengharapkan, agar penerapan kurikulum baru ini tidak akan membuahkan kebingungan di kalangan guru sebagai pelaksana di lapangan. Kita berharap, gagasan Pemerintah ini benar-benar matang dan para guru mampu mengikuti perubahan ini dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut tentu sejalan dengan tema peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2012 dan Hari Ulang Tahun ke-67 PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), yaitu "Memacu Profesionalisasi Guru melalui Peningkatan Kompetensi dan Penegakan Kode Etik". Tema ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bahwa peningkatan kompetensi guru dan penegakan kode etik, adalah langkah penting untuk memacu profesionalisasi guru dalam pembangunan karakter.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam masalah sosial kemasyarakatan, kita melihat telah dilaksanakan peringatan Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember 2012 yang lalu. Kegiatan peringatan tersebut tentu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita akan bahaya HIV/AIDS sehingga bisa mencegahnya serta membantu para Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk bisa diterima oleh masyarakat.

Di Asia, Indonesia merupakan tempat pertumbuhan HIV/AIDS yang paling cepat. Dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diketahui bahwa daerah yang paling banyak kasus HIV/AIDS per-Desember 2011 adalah Jakarta, disusul Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, serta Bali. Sedangkan rentang umur penderita HIV/AIDS terbanyak adalah pada umur 20–29 tahun sebanyak 45,5% dan umur 30–39 tahun sebanyak 31,8%.

Kita menaruh perhatian mengenai hal ini karena HIV/AIDS bukan hanya masalah medis, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. ODHA sering dijauhi dalam pergaulan karena dianggap perilaku negatifnya dapat menularkan HIV/AIDS. Perlakuan diskriminasi terhadap ODHA, perlu mendapat perhatian.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Hal lain yang menyita perhatian kita adalah mengenai prestasi sepak bola nasional kita yang terus menurun, bahkan tahun ini mencatat prestasi terburuk dalam sejarah keikutsertaannya di Piala ASEAN (Piala AFF). Kabar ini tentu makin memperburuk wajah dunia olahraga di tanah air, khususnya cabang sepakbola yang selama ini mengalami dualisme kepengurusan yaitu PSSI dan KPSI. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sepakbola nasional tidak profesional akibat dari dualisme manajemen kompetisi yang dikelola PSSI dan KPSI. Kita masih menunggu hasil sidang FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*) yang tengah membahas sanksi bagi PSSI. Kita berharap, apapun keputusan FIFA tidak merugikan persepakbolaan kita.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Terkait dengan kegiatan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR-RI, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan *Parliamentary Event on Interfaith Dialogue*, sebagai bagian dari kegiatan organisasi antar parlemen negara-negara anggota OKI (PUIC), yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 21-24 November, telah berhasil dilaksanakan dengan baik oleh DPR-RI sebagai tuan rumah.

Kegiatan yang mengambil tema *The Parliamentary Role in Promoting Interfaith and Intercultural Cooperation* dan dihadiri oleh anggota parlemen dari 17 (tujuh belas) negara, 4 (empat) organisasi internasional, dan 25 (dua puluh lima) organisasi nasional, berhasil mencetuskan **Deklarasi Bali**. Deklarasi ini antara lain menyebutkan, bahwa para anggota parlemen, pemuka agama, serta perwakilan komunitas agama mengakui seluruh agama dan kepercayaan dapat memberikan kontribusi berharga terhadap peradaban manusia, meningkatkan perdamaian dan toleransi antar umat manusia, karena pada dasarnya agama mengajarkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita.

Melalui kegiatan ini, parlemen bermaksud mengingatkan seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat manusia dimanapun berada dan pentingnya dialog dalam mencari solusi permasalahan yang dilatarbelakangi oleh isu agama dan budaya.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Kita patut menyambut baik bahwa Sidang Umum PBB pada tanggal 29 November 2012, memutuskan Palestina mendapatkan status sebagai **negara peninjau non-anggota di PBB**. Atas perkembangan positif tersebut, masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia mensyukurinya, dan kita berharap hal ini dapat menjadi sarana perjuangan lebih lanjut bagi Palestina dalam meraih status anggota penuh PBB dan mewujudkan hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Dewan mengapresiasi perjuangan diplomasi Indonesia sebagai salah satu negara yang memprakarsai Resolusi PBB tersebut dan juga diplomasi yang dilakukan oleh DPR-RI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada setiap pertemuan parlemen, baik di tingkat regional maupun internasional.

Sebagaimana diketahui pula, pada saat yang tepat, Delegasi Komisi I DPR-RI melakukan kunjungan ke Gaza Palestina, bertemu dengan rakyat dan parlemen Palestina, sebagai bentuk representasi dari aspirasi masyarakat yang menginginkan terciptanya perdamaian di kawasan tersebut. Kehadiran Komisi I DPR-RI di Palestina, juga disusul oleh kunjungan Ketua DPR dan delegasi BKSAP untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan secara langsung.

Sebelum melakukan kunjungan ke Palestina, Ketua DPR dan delegasi, melakukan kunjungan ke Tunisia, bertemu dengan Perdana Menteri, Ketua Majelis Konstituante Nasional Tunisia, dan Presiden Tunisia. Selain meningkatkan hubungan kedua negara, DPR juga membicarakan mengenai masalah Palestina, dimana Indonesia senantiasa mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Delegasi Ketua DPR juga berkunjung ke Mesir, diterima Presiden Mesir Muhammad Moursi dan Majelis Shuro Republik Arab Mesir. Presiden Mesir mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah mendukung dan membantu Mesir dalam menjalankan transformasi demokrasi, dan berharap hubungan kedua negara dapat terus ditingkatkan, tidak hanya hubungan politik dan sosial, tetapi juga ekonomi dan perdagangan.

Beberapa hari sebelumnya, Ketua DPR juga memimpin delegasi muhibah ke Aljazair. Delegasi DPR-RI melakukan pertemuan, antara lain, dengan Presiden Republik Demokratik Aljazair, Perdana Menteri Aljazair, Ketua Majelis Rakyat Nasional, serta Ketua Senat. Selama kunjungan, Delegasi DPR-RI mendapatkan sambutan hangat dan

antusias, dan kedua belah pihak telah memanfaatkan kunjungan muhibah DPR-RI ini guna memperkuat komitmen kerja sama, termasuk dari pihak Presiden dan Perdana Menteri Aljazair, untuk menindaklanjuti hasil-hasil pembicaraan yang telah berlangsung di antara kedua belah pihak.

Dalam kesempatan ini, Dewan sangat menyesalkan pernyataan yang disampaikan oleh Mantan Menteri Penerangan Malaysia dalam media Malaysia, yang di akhir kalimatnya memberikan pernyataan yang tidak pantas terhadap Presiden RI ketiga BJ. Habibie. Untuk itu, Dewan akan menyampaikan surat keberatan kepada Perdana Menteri Malaysia, mengingat pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan pejabat public setingkat menteri, yang betul-betul menghina bangsa Indonesia.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Berkaitan dengan keputusan perkara etik Badan Kehormatan DPR-RI, Pimpinan Dewan memberikan apresiasi atas keputusan rehabilitasi terhadap empat anggota DPR yang tidak terbukti melanggar Kode Etik DPR-RI. Selain itu, Pimpinan DPR juga akan menyampaikan surat kepada Presiden RI agar menegur Menteri BUMN untuk lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam melontarkan isu ke publik yang belum jelas bukti dan masalahnya.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada kesempatan ini, Pimpinan Dewan menginformasikan bahwa Koperasi Pengawas Setjen DPR-RI yang merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikelola di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI, telah mengalami pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Setelah pada bulan Juli 2012 ditetapkan sebagai Koperasi terbaik urutan ke-5 dari 342 Koperasi tingkat Provinsi DKI Jakarta, pada 7 Desember yang lalu, Koperasi Pegawai Setjen DPR-RI kembali menerima penghargaan terbaik "UMKM Award tahun 2012" dan intensif modal senilai Rp. 10 juta dari Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk kategori "Koperasi Karyawan" BUMN/BUMD/TNI/Polri/PNS tingkat nasional dengan menyisihkan 6.679 koperasi pegawai seluruh Indonesia.

Semoga penghargaan atas prestasi tersebut, menjadi awal yang baik untuk meningkatkan fungsi dan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai Setjen DPR-RI sebagai unsur pendukung bagi DPR-RI.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Selain itu, Dewan memintakan perhatian akan datangnya musim penghujan dengan curah hujan yang makin tinggi. Diprediksi musim hujan akan mendatangkan banjir dan longsor, dan dampak lebih lanjut adalah timbulnya berbagai penyakit, antara lain infeksi saluran pernafasan, penyakit kulit dan lain sebagainya. Pemerintah Daerah dan lembaga terkait harus siap dengan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi bila terjadi bencana banjir. Oleh karenanya, kewaspadaan harus ditingkatkan.

Kita akan menutup tahun 2012, dimana di penghujung tahun ini, kita akan memasuki liburan sekolah, hari Natal, dan Tahun baru. Untuk itu, Dewan mendorong pemerintah untuk mengawal momentum tersebut secara optimal, baik berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, kesiapan transportasi, serta keamanan.

Melalui mimbar ini, izinkanlah Pimpinan Dewan mengucapkan **Selamat Natal** bagi Umat Kristiani, serta **Selamat Tahun Baru 2013** bagi seluruh anggota Dewan dan rakyat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan sepanjang tahun 2013 dapat kita menjalaninya dengan berkah dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.***

Jakarta, 14 Desember 2012

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H. Marzuki Alie**